

## ANALISIS PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP TAX AVOIDANCE

Cynthia Anabella Dilinanda, Kazia Laturette  
Universitas Ciputra Surabaya

*Abstract: This study aims to determine the effect of independent commissioners, audit committees, managerial ownership and corporate social responsibility on tax avoidance with profitability as the control variable. The population in this study are companies listed on the SRI-KEHATI index in 2018–2019. The sample in this study were 27 companies in 2018 and 26 companies in 2019 so as to produce 53 data on companies listed on the SRI-KEHATI index which were selected by purposive sampling. After conducting outliers, the research sample obtained was 49 samples of companies listed on the SRI-KEHATI index. The results of this study indicate that the mechanism of good corporate governance consisting of independent commissioners, audit committees and managerial ownership has a significance value of  $> 0.05$ . Based on these results, it can be concluded that the mechanism of good corporate governance consisting of independent commissioners, audit committees and managerial ownership has no significant effect on tax avoidance. Other results in this study indicate that corporate social responsibility has a significance value of  $<0.05$  with a positive direction. Based on these results, it can be concluded that corporate social responsibility has a significant positive effect on tax avoidance. This is because corporate social responsibility is used as a tool to cover the company's shortcomings or mistakes.*

**Keywords:** *tax avoidance, independent commissioners, audit committees, managerial ownership and corporate social responsibility*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* dengan variabel kontrol profitabilitas. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di indeks SRI-KEHATI pada tahun 2018–2019. Sampel pada penelitian ini yaitu 27 perusahaan pada tahun 2018 dan 26 perusahaan pada tahun 2019 sehingga

---

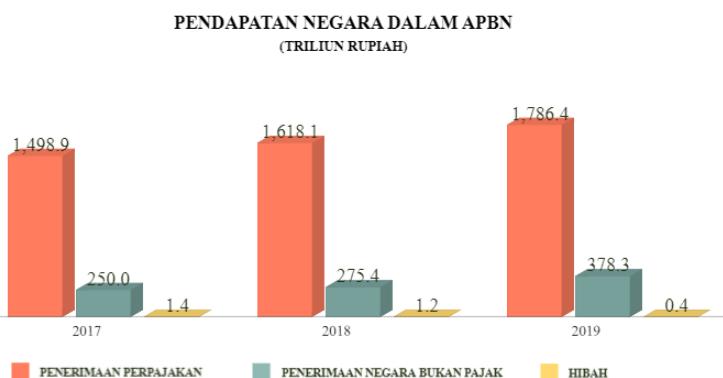
\*Corresponding Author.  
e-mail: canabella@student.ciputra.ac.id

menghasilkan 53 data perusahaan yang terdaftar di indeks SRI-KEHATI yang dipilih secara *purposive sampling*. Setelah dilakukan *outlier*, diperoleh sampel penelitian sebanyak 49 sampel perusahaan yang terdaftar di indeks SRI-KEHATI. Hasil penelitian ini menunjukkan mekanisme *good corporate governance* yang terdiri dari komisaris independen, komite audit dan kepemilikan manajerial memiliki nilai signifikansi  $>0,05$ . Berdasarkan hasil tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme *good corporate governance* yang terdiri dari komisaris independen, komite audit dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil lain pada penelitian ini menunjukkan *corporate social responsibility* memiliki nilai signifikansi  $<0,05$  dengan arah positif. Berdasarkan hasil tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut dikarenakan *corporate social responsibility* digunakan sebagai alat untuk menutupi kekurangan atau kesalahan perusahaan.

**Kata kunci:** penghindaran pajak, komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan tanggung jawab sosial perusahaan

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib untuk negara oleh orang pribadi maupun badan yang tidak secara langsung menerima timbal balik dan bersifat memaksa menurut undang-undang. Pajak penting bagi pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat luas dan juga sebagai jembatan pemerataan sosial dan ekonomi. Pajak menurut pemerintah merupakan sumber utama pendapatan untuk melakukan pembangunan nasional, namun wajib pajak menganggap pajak merupakan beban

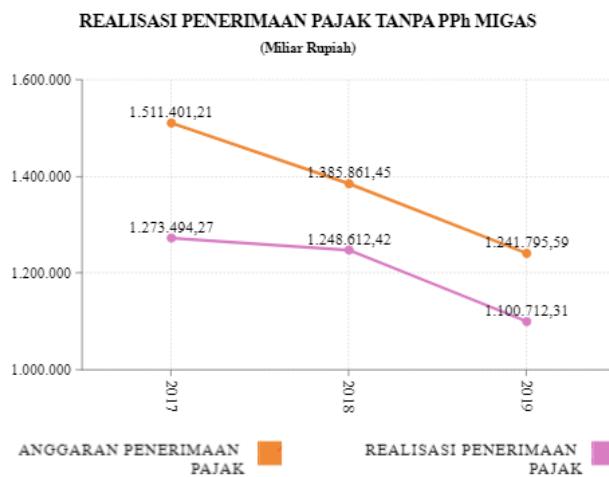


**Gambar 1 Pendapatan Negara dalam APBN**  
Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2020)

yang dapat mengurangi pendapatan atau keuntungan mereka (Januari & Suardikha, 2019). Dapat dilihat dalam APBN tahun 2017–2019 bahwa penerimaan pajak merupakan pendapatan terbesar negara melalui data yang dapat dilihat pada Gambar 1.

Data tersebut menunjukkan besarnya penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Sekitar 80% pendapatan negara didapat dari penerimaan pajak. Hal ini membuktikan seberapa penting pajak bagi negara.

Sebagai subjek pajak yang baik, orang pribadi maupun badan harus memiliki kesadaran pajak yang tinggi agar terhindar dari *tax avoidance* atau yang lebih dikenal penghindaran pajak apalagi melakukan tindakan yang tidak mematuhi peraturan seperti *tax evasion* atau yang lebih dikenal penggelapan pajak. *Tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan secara legal oleh wajib pajak untuk mengurangi atau menekan pajak yang dibebankannya dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan yang ada di bidang perpajakan secara optimal (Maulinda & Fidiana, 2019). Wajib pajak badan sering kali melakukan penekanan atau pengurangan pada beban pajaknya untuk mendapatkan keuntungan yang besar atau sesuai dengan keinginannya (Maulinda & Fidiana, 2019). Penghindaran pajak memiliki hubungan yang erat dengan penerimaan perpajakan karena semakin besar penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan akan berdampak pada penerimaan pajak yang juga berpengaruh pada pendapatan negara (Maulana et al., 2019).

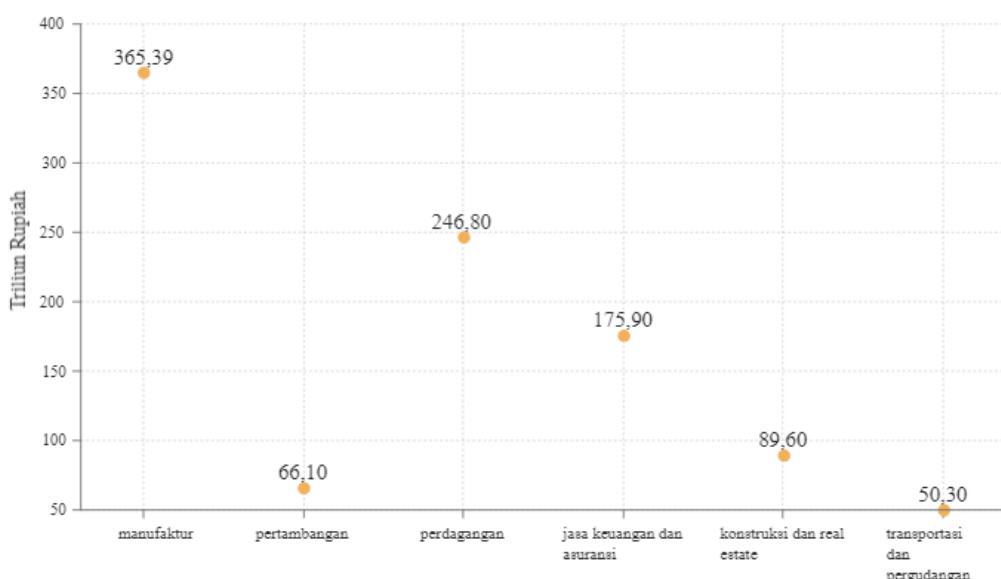


**Gambar 2 Realisasi Penerimaan Pajak Tanpa PPh Migas**  
Sumber: Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak (2020)

Gambar 2 menunjukkan realisasi dari penerimaan perpajakan tanpa PPh migas. realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya tidak mencapai estimasi anggaran yang telah disusun. Hanya sekitar 80% hingga 90% pajak yang terealisasi dari anggaran tahun 2017–2019. Hal ini berpengaruh pada pendapatan negara. Jika dilihat pada gambar di bawah dapat dilihat realisasi kontribusi pajak tiap sektor usaha terhadap penerimaan pajak.

**REALISASI PAJAK TAHUN 2019 PER SEKTOR USAHA**

(triliun rupiah)



**Gambar 3 Realisasi Pajak Tahun 2019 Per Sektor Usaha**

Sumber: DDTG (2020)

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan perusahaan melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah sistem pemungutan pajak yang menggunakan *self assessment system* (Purbowati, 2021). Sistem ini memberikan kepercayaan pemerintah kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak. Di sini peran *good corporate governance* diperlukan. Dengan penerapan *good corporate governance*, perusahaan dapat terhindar dari melakukan tindak penghindaran pajak. Di Indonesia sendiri praktik penghindaran pajak masih dilakukan oleh banyak perusahaan. Contoh kasus penghindaran pajak adalah PT

Garuda Indonesia (GIAA) yang pernah terdaftar dalam indeks SRI-KEHATI sebelum tersandung kasus penyelundupan Harley dan Brompton. Kasus ini menyebabkan negara berpotensi kehilangan penerimaan pajak mencapai Rp 1,5 miliar (Citradi, 2019).

Indeks SRI-KEHATI sendiri dikenal dengan indeks hijau yang memiliki perusahaan-perusahaan dengan kinerja yang baik. Dalam website Kehati sendiri dikatakan perusahaan yang dipilih masuk ke dalam SRI-KEHATI merupakan perusahaan yang menerapkan prinsip *Sustainable Responsible Investment* (SRI) serta prinsip *Environmental, Social and Good Governance* (ESG). Adanya indeks SRI-KEHATI diharapkan banyak perusahaan yang mengedepankan penerapan *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* untuk dapat mengurangi tindak penghindaran pajak.

Perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* memiliki pihak yang membantu serta mengawasi pimpinan perusahaan dalam pengambilan keputusan. Beberapa mekanisme yang dibahas pada penelitian ini membantu sistem pengawasan dalam pengelolaan perusahaan seperti komisaris independen, komite audit dan kepemilikan manajerial. Dengan penerapan *good corporate governance*, perusahaan dapat terhindar dari melakukan tindak penghindaran pajak. Banyaknya komisaris independen dan komite audit akan meningkatkan pengawasan. Adanya kepemilikan manajerial juga memberikan pengawasan terhadap penghindaran pajak karena manajer yang menanamkan modal tidak ingin mengalami kerugian akibat sanksi ataupun pelanggaran yang diterima perusahaan. Penerapan *corporate social responsibility* juga dikatakan dapat mengurangi tindak penghindaran pajak. *Corporate social responsibility* merupakan tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholder* dan masyarakat. Pajak termasuk kedalam tanggung jawab tersebut sehingga penerapan *corporate social responsibility* akan ikut berperan dalam pengambilan keputusan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Terdapat hasil penelitian yang berbeda dari uraian di atas, sehingga peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* dengan profitabilitas sebagai variabel kontrol pada perusahaan yang terdaftar di indeks SRI-KEHATI dengan periode pengamatan 2018–2019.

## LANDASAN TEORI

### Teori Agensi

Teori agensi dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) yang merupakan gambaran hubungan kontraktual antara *principal* yaitu pemilik atau pemegang saham sebagai pemberi wewenang dengan *agent* yaitu manajer sebagai penerima wewenang (Stella et al., 2020). Teori ini mendukung pemahaman tentang *good corporate governance*. Pada teori ini dikatakan pemilik atau pemegang saham memiliki tujuan yang berbeda dengan manajer. Hal ini menimbulkan adanya konflik agensi.

Konflik agensi terjadi karena pecahnya kepentingan antara pemegang saham dengan manajer perusahaan. Pemegang saham menginginkan perolehan dividen yang besar sedangkan manajer perusahaan ingin laba yang besar akan membuat pajak juga membesar (Ratu, 2020). Manajer perusahaan dapat melakukan segala hal agar mendapat laba besar dengan pengeluaran yang kecil. Maka dari itu pentingnya penerapan pengelolaan perusahaan yang baik agar terhindar dari tindakan menyimpang seperti praktik penghindaran pajak dan memperketat pengawasan.

### Teori Legitimasi

Gray et al. (1995) dalam Ratu (2020) mengatakan teori legitimasi merupakan sistem dalam pengelolaan suatu perusahaan yang orientasinya berpihak pada masyarakat, pemerintah, individu dan juga kelompok masyarakat. Teori legitimasi menggambarkan dalam perusahaan terdapat tanggung jawab terhadap masyarakat (Ratu, 2020). Teori ini berkaitan dengan kinerja keuangan dan juga kinerja sosial. Jika ada yang tidak konsisten dalam sistem nilai perusahaan atau sistem nilai sosial, perusahaan bisa kehilangan legitimasi dan dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan (Panjaitan et al., 2021). Upaya mempertahankan legitimasi, perusahaan dapat menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut Maulinda & Fidiana (2019) perusahaan dengan lingkungan sekitarnya terikat dalam kontrak sosial karena adanya relasi yang erat. Hal ini menunjukkan keberadaan perusahaan yang didukung secara politis dan dijamin regulasi pemerintah (representasi masyarakat) dapat dikatakan kontrak sosial yang secara tidak langsung memberikan *cost* dan *benefits* untuk keberlanjutan perusahaan.

## Tax Avoidance

*Tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi pajak yang dibebankan dengan cara yang legal serta memanfaatkan ketentuan yang ada pada bidang perpajakan (Maulinda & Fidiana, 2019). Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi pajak yang dibebankan yaitu seperti pemotongan atau pengecualian yang diperkenankan, manfaat lain yang belum memiliki peraturan dan kelemahan yang ada dalam peraturan yang tidak keluar dari aturan perpajakan yang berlaku atau dapat dikatakan tidak menyimpang. Penghindaran pajak dapat diukur menggunakan ETR (*Effective Tax Rates*) yaitu perbandingan antara beban pajak penghasilan dengan pendapatan sebelum pajak (Ratu, 2020). ETR menunjukkan semua beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan termasuk pajak final dan utang atau manfaat pajak tangguhan. ETR yang nilainya semakin besar menunjukkan semakin rendah praktik penghindaran pajak dan juga sebaliknya. *Effective tax rates* atau ETR menurut Ratu (2020) diukur sebagai berikut.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

## Good Corporate Governance

*Good corporate governance* merupakan hubungan tata kelola dengan tanggung jawab antara pihak yang bersangkutan seperti anggota direksi, komisaris dan manajer untuk mendorong kinerja perusahaan seperti yang dinyatakan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), (Panjaitan et al., 2021). Dapat dikatakan *good corporate governance* merupakan hubungan baik atau sinergi pengelola perusahaan seperti manajer, pemilik, pemegang saham dan lainnya yang diatur menggunakan suatu sistem, proses atau struktur untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan (Ratu, 2020). *Good corporate governance* juga memiliki prinsip-prinsip menurut *National Committee on Governance* (KNKG) yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan keadilan, serta kesetaraan (Widyanza, 2020). Pengukuran *good corporate governance* memiliki beberapa *proxy* antara lain yang digunakan pada penelitian ini yaitu komisaris independen, komite audit dan kepemilikan manajerial.

## Komisaris Independen

Komisaris independen adalah dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan direksi dan tidak menjabat posisi direktur di perusahaan sesuai dengan aturan BEI (Widyanza, 2020). Tujuan dari adanya komisaris independen adalah sebagai pemeriksa dan penyeimbang (check and balance) dalam kegiatan pelaksanaan perusahaan (Alvenina, 2021). Fungsi komisaris independen adalah untuk mengawasi, membantu pengelolaan perusahaan dengan baik, serta membuat laporan keuangan perusahaan menjadi lebih objektif sehingga diharapkan dapat mengurangi peluang praktik penghindaran pajak (Ratu, 2020). Komisaris independen dapat diukur menggunakan perbandingan antara komisaris independen dengan total komisaris. Komisaris independen menurut Ratu (2020) diukur sebagai berikut.

$$KOMIND = \frac{\Sigma \text{ Komisaris Independen}}{\Sigma \text{ Dewan Komisaris}}$$

## Komite Audit

Komite audit adalah suatu bentukan dewan komisaris untuk membantu pelaksanaan dan fungsi dewan komisaris (Maulinda & Fidiana, 2019). Komite audit melakukan fungsi pengawasan dalam proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal perusahaan. Menurut Alves dalam Tiala et al. (2019) mengatakan komite audit berfungsi untuk memperkecil asimetri informasi antara manajer dengan anggota dewan di luar. Komite audit menurut Tiala et al. (2019) diukur sebagai berikut.

$$KA = \Sigma \text{ Komite Audit}$$

## Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah manajer pada suatu perusahaan yang juga memiliki saham perusahaan tersebut. Kepemilikan manajerial memiliki fungsi sebagai *monitoring* yang positif untuk mengurangi konflik keagenan (Wati, 2020). Kepemilikan manajerial yang semakin banyak akan membuat semakin sedikit masalah keagenan karena kepemilikan manajerial memiliki dua peran sebagai pihak *agent* dan pihak *principal* (Setianti, 2019). Menurut Sabli & Noor dalam Fauzan et al. (2021) kepemilikan manajerial dapat diukur sebagai berikut.

$$KM = \frac{\text{total kepemilikan manajer}}{\text{total saham beredar}}$$

### Corporate Social Responsibility

*Corporate social responsibility* merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi perusahaan kepada sekitar akibat pengaruh dari operasional perusahaan sebagai bentuk dan upaya untuk kelangsungan hidup perusahaan di masa mendatang dengan cara memberi bantuan atau solusi pada masyarakat sekitar yang dilakukan secara berkelanjutan (Maulinda & Fidiana, 2019). *Corporate social responsibility* merupakan komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, meningkatkan kualitas dan komunikasi masyarakat luas (Panjaitan et al., 2021). *Corporate social responsibility* diungkapkan menggunakan GRI (*Global Reporting Initiative*) dengan indikator yang berfokus pada lingkungan, ekonomi dan sosial dengan berpedoman pada *triple bottom line* (Permatasari & Widianingsih, 2020). GRI merupakan standar pengungkapan yang digunakan dunia sebagai acuan dalam membuat laporan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan dapat memberikan manfaat kepada para *stakeholder* (Permatasari & Widianingsih, 2020). Saat ini GRI yang digunakan adalah GRI *Standards*. Jumlah item yang ada pada GRI *Standards* sebanyak 89 item. CSR menurut Maulinda & Fidiana (2019) diukur sebagai berikut.

$$CSRDI = \frac{\sum X_{yi}}{ni}$$

CSRDI: *Corporate social responsibility disclosure index*

$\sum X_{yi}$  : Jumlah item yang diungkapkan

ni : Jumlah item pada standar yang harus diungkapkan

### Indeks SRI-KEHATI

Indeks saham *sustainable and responsible investment* (SRI) yang diterbitkan oleh Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia dan kerjasama Bursa Efek Indonesia dikenal dengan indeks SRI-KEHATI merupakan indeks hijau yang diluncurkan pada tanggal 8 Juni 2009. Indeks SRI-KEHATI merupakan cerminan pergerakan harga saham bagi *stakeholder* terhadap saham perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja optimal, baik keberlanjutan maupun dalam menjalankan

*good corporate governance*. Perusahaan yang masuk ke dalam indeks SRI-KEHATI harus melakukan beberapa seleksi. Dalam seleksi, kriteria yang diperhatikan yaitu aspek keuangan serta aspek fundamental seperti tata kelola perusahaan, lingkungan, keterlibatan masyarakat, perilaku bisnis, sumber daya manusia dan hak asasi manusia. Kriteria ini yang menyebabkan indeks SRI-KEHATI berbeda dengan indeks lainnya.

## Hipotesis

Menurut Ratu (2020) komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin banyak komisaris independen akan semakin kecil tindakan penghindaran pajak karena pengawasan terhadap manajemen semakin besar. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

H1: Komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di indeks SRI-KEHATI pada tahun 2018–2019

Menurut Tiala et al. (2019) komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak karena semakin banyak komite audit maka tingkat pengawasan semakin ketat untuk mendorong efisiensi dan efektivitas atas beban pajak perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

H2: Komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di indeks SRI-KEHATI pada tahun 2018-2019

Menurut Fauzan et al. (2021) kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengartikan semakin banyak kepemilikan manajerial pada suatu perusahaan, akan semakin kecil penghindaran pajak perusahaan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

H3: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di indeks SRI-KEHATI pada tahun 2018–2019

Menurut Januari & Suardikha (2019) dan Maulinda & Fidiana (2019) *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin banyak *corporate social responsibility* yang diungkapkan akan semakin kecil praktik penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

H4: *Corporate social responsibility* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di indeks SRI-KEHATI pada tahun 2018–2019

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode yang memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, digunakan untuk pembuktian atau konfirmasi, berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2017). Metode pengambilan sampel penelitian ini menggunakan *probability sampling* yaitu *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel penelitian dari populasi dengan adanya kriteria tertentu (Hartono, 2018). Dalam penelitian ini kriteria sampel yang dibutuhkan adalah perusahaan yang masuk dalam indeks SRI-KEHATI pada tahun 2018–2019 dan menyajikan laporan keuangan serta laporan tahunan pada tahun 2018–2019.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder atau data tidak langsung merupakan data yang diberikan lewat orang lain atau dokumen kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi didapat dari pengumpulan data dari dokumen yang telah ada. Data dalam penelitian ini diperoleh dari *website* Bursa Efek Indonesia (BEI) *website* perusahaan yang berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di indeks SRI-KEHATI tahun 2018–2019. Dalam penelitian ini semua variabel menggunakan skala pengukuran rasio.

## ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran terhadap karakteristik variabel yang digunakan dalam penelitian. Analisis deskriptif menggunakan 49 data dari tahun 2018–2019.

**Tabel 1 Hasil Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Komisaris independen (X1)	49	0,286	0,833	0,436	0,117
Komite audit (X2)	49	3	8	4,02	1,377
Kepemilikan manajerial (X3)	49	0,000	0,004	0,000	0,001
<i>Corporate social responsibility</i> (X4)	49	0,135	0,618	0,264	0,101
Profitabilitas (X5)	49	-0,212	0,467	0,059	0,094
Penghindaran pajak (Y)	49	0,007	0,631	0,235	0,120

Nilai *mean* komisaris independen sebesar 0,436 yang lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi sebesar 0,117. Nilai *mean* komite audit sebesar 4,02 yang lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi sebesar 1,377. Nilai *mean corporate social responsibility* sebesar 0,264 yang lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi sebesar 0,101. Pada nilai *mean* penghindaran pajak sebesar 0,235 yang lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi sebesar 0,120. Hal ini menunjukkan tingkat variasi data rendah, sehingga data dikatakan homogen atau tidak beragam.

Nilai *mean* kepemilikan manajerial sebesar 0,000 yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai standar deviasi sebesar 0,001. Nilai *mean* sebesar 0,059 yang lebih kecil dibandingkan nilai standar deviasi sebesar 0,094. Hal ini menunjukkan tingkat variasi data yang terjadi cukup tinggi, sehingga data dikatakan heterogen atau beragam.

### Uji Asumsi Klasik

1. Uji normalitas digunakan untuk melihat variabel independen dan variabel dependen berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test untuk menguji normalitas.

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

Nilai	
N	49
Sig.	0,200

Hasil uji normalitas pada Tabel 2 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,200. Nilai ini lebih besar dari 0,05 yang artinya model regresi berdistribusi normal.

2. Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat ada atau tidaknya hubungan atau korelasi antar variabel independen.

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Komisaris independen (X1)	0,683	1,465
Komite audit (X2)	0,636	1,572
Kepemilikan manajerial (X3)	0,857	1,167
<i>Corporate social responsibility</i> (X4)	0,940	1,064
Profitabilitas (X5)	0,580	1,724

Hasil statistik data pada Tabel 3 menunjukkan semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10 yang artinya tidak ditemukan gejala multikolinearitas pada variabel independen yang digunakan.

3. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.

Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

	Model	Sig.
1	(Constant)	0,202
	Komisaris independen (X1)	0,930
	Komite audit (X2)	0,413
	Kepemilikan manajerial (X3)	0,746
	<i>Corporate social responsibility</i> (X4)	0,121
	Profitabilitas (X5)	0,282

Dalam Tabel 4, nilai semua variabel independen memiliki signifikansi lebih dari 0,05 diartikan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4. Uji autokorelasi digunakan untuk melihat suatu model regresi terdapat gejala autokorelasi atau tidak.

**Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi**

Model	Durbin-Watson
1	2,049

Hasil statistik data pada Tabel 5 menunjukkan nilai *Durbin-Watson* (DW) sebesar 2,049. Pada penelitian ini jumlah observasi yaitu sebanyak 49 dengan 5 variabel independen. Berdasarkan tabel DW maka diperoleh nilai Du sebesar 1,7716 sehingga nilai 4-Du sebesar 2,2284. Hal ini menunjukkan nilai Du lebih kecil dari nilai DW dan nilai DW lebih kecil dari nilai 4-Du ( $D_u < DW < 4-D_u$ ) yang artinya tidak terjadi gejala autokorelasi dalam regresi.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengukur besar pengaruh variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini menggunakan lebih dari 1 variabel independen dan 1 variabel dependen maka menggunakan regresi linear berganda.

**Tabel 6 Hasil Regresi Linear Berganda**

	Model	B
1	(Constant)	0,060
	Komisaris independen (X1)	0,114
	Komite audit (X2)	0,008
	Kepemilikan manajerial (X3)	-32,05
	<i>Corporate social responsibility</i> (X4)	0,393
	Profitabilitas (X5)	0,065

Berdasarkan hasil statistik data, dapat diuraikan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut.

$$ETR = 0,060 + 0,114X1 + 0,008X2 - 32,048X3 + 0,393X4 + 0,065X5 + \varepsilon$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, nilai konstanta ( $\alpha$ ) memiliki nilai positif sebesar 0,060 yang artinya pengaruh yang searah antar variabel independen

dan variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yang terdiri dari komisaris independen, komite audit, *corporate social responsibility* dan profitabilitas sebesar 0, kepemilikan manajerial sebesar 32, maka besar variabel penghindaran pajak sebesar 0,060. Nilai koefisien regresi variabel komisaris independen (X1) yaitu sebesar 0,114 dan menunjukkan arah positif. Nilai koefisien regresi variabel komite audit (X2) yaitu sebesar 0,008 dan menunjukkan arah positif. Nilai koefisien regresi variabel kepemilikan manajerial (X3) yaitu sebesar -32,048 dan menunjukkan arah negatif artinya berlawanan arah antara variabel kepemilikan manajerial dengan variabel penghindaran pajak. Nilai koefisien regresi variabel *corporate social responsibility* (X4) yaitu sebesar 0,393 dan menunjukkan arah positif. Nilai koefisien regresi variabel profitabilitas (X5) yaitu sebesar 0,065 dan menunjukkan arah positif.

### **Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

**Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R Square
1	0,227

Hasil statistik data menunjukkan nilai *R Square* sebesar 0,227 yang artinya penghindaran pajak yang diindikasi dengan ETR dapat dijelaskan variabel komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, *corporate social responsibility*, dan profitabilitas sebesar 22,7% dan sisanya sebesar 77,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

### **Uji Hipotesis**

1. Uji statistik F digunakan untuk menguji variabel dependen berhubungan linear terhadap variabel-variabel independen atau tidak. Uji F digunakan juga untuk mengetahui variabel-variabel independen berpengaruh secara simultan atau tidak terhadap variabel dependen.

Tabel 8 Hasil uji F

Model	F	Sig.
1 Regression	2,524	0,043 <sup>b</sup>
Residual		
Total		

Hasil statistik data menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,043 yang kurang dari 0,05. Hal ini memiliki arti bahwa variabel independen memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen dan penelitian layak digunakan.

2. Uji t digunakan untuk menguji seberapa pengaruh pada masing-masing variabel independen yang digunakan dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Kriteria dalam uji statistik t yaitu bila nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen dan sebaliknya bila lebih dari 0,05 maka variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 9 Hasil Uji t

Model	Sig.
1 (Constant)	0,500
Komisaris independen (X1)	0,495
Komite audit (X2)	0,579
Kepemilikan manajerial (X3)	0,115
<i>Corporate social responsibility</i> (X4)	0,021
Profitabilitas (X5)	0,773

Berdasarkan hasil statistik data, variabel komisaris independen (X1) memiliki nilai signifikansi 0,495 yang nilainya lebih dari 0,05 artinya komisaris independen (X1) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, maka  $H_1$  ditolak. Variabel komite audit (X2) memiliki nilai signifikansi 0,579 yang nilainya lebih dari 0,05 artinya komite audit (X2) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, maka  $H_2$  ditolak. Variabel kepemilikan manajerial (X3) memiliki nilai signifikansi 0,115 yang nilainya lebih besar dari 0,05 artinya kepemilikan manajerial (X3) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, maka  $H_3$  ditolak. Variabel *corporate social responsibility* (X4) yang diindikasi dengan CSRDI memiliki nilai signifikansi 0,021 yang nilainya kurang dari

0,05 artinya *corporate social responsibility* (X4) berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, nilai t pada variabel *corporate social responsibility* menunjukkan 2,389 yang artinya *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sehingga  $H_4$  ditolak.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, komisaris independen mendapat nilai Signifikansi sebesar 0,495 yang artinya tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga  $H_1$  ditolak. Menurut Maulinda & Fidiana (2019) banyak atau sedikitnya komisaris independen pada perusahaan tidak memberi jaminan perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak. Pada perusahaan yang terdaftar di indeks SRI-KEHATI yang dianggap menerapkan prinsip *good governance* yang baik, dengan hasil penelitian ini ternyata keberadaan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Penelitian ini juga mendukung penelitian Doho & Santoso (2020), hal ini dapat terjadi jika komisaris kurang sanggup untuk independen atau menolak pengaruh dan tekanan manajemen atau mayoritas pemegang saham yang memiliki kepentingan atas keputusan tertentu. Struktur kepemilikan mayoritas masih merupakan pemegang kontrol dalam menjalankan perusahaan. Hal ini dapat membuat fungsi pengawasan yang dimiliki komisaris independen tidak mencapai pengawasan yang mampu membuat manajemen menekan tindakan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Maulinda & Fidiana (2019) pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* dan penelitian Fauzan et al. (2021) pada perusahaan sektor barang konsumsi yang menyatakan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan pengawasan atau *monitoring* yang dilakukan oleh komisaris independen terhadap kinerja manajemen tidak sampai menekan tindakan penghindaran pajak (Maulinda & Fidiana, 2019). Hasil dari penelitian menunjukkan tidak adanya konflik agensi antara manajemen (agen) dengan pemegang saham (principal). Dalam hal ini agen diwakilkan oleh komisaris independen yang telah berfungsi sebagaimana

mestinya. Legitimasi yang diberikan kepada komisaris independen telah dilaksanakan dengan baik. Komisaris independen berperan sebagaimana mestinya, sehingga tidak ada penghindaran pajak.

### **Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance**

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan mendapatkan nilai signifikansi sebesar 0,579 yang artinya komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak sehingga  $H_2$  ditolak. Banyak atau sedikitnya jumlah komite audit pada perusahaan yang terdaftar di indeks SRI-KEHATI tidak menjamin perusahaan terhindar dari tindakan penghindaran pajak. Tugas komite audit dalam perusahaan hanya sebatas mengawasi dan memeriksa laporan keuangan serta operasional perusahaan, tidak sampai ikut untuk menentukan kebijakan tarif pajak efektif perusahaan secara langsung (Fidiana & Hidayati, 2021) dalam (Alvenina, 2021).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Maulinda & Fidiana (2019) pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* dan penelitian Purbowati (2021) pada perusahaan manufaktur yang menyatakan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Peran komite audit tidak sampai mampu untuk menekan tindakan penghindaran pajak karena tidak berperan aktif dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan aktivitas penghindaran pajak. Dengan adanya Komite Audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini mengonfirmasi teori legitimasi. Komite Audit berperan sebagai control dalam perusahaan. Komite Audit telah menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dengan baik. Penelitian ini juga membuktikan tidak adanya konflik kepentingan antara manajemen (agen) dalam hal ini adalah komite audit dengan prinsipal (pemegang saham).

### **Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tax Avoidance**

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan mendapatkan nilai signifikansi sebesar 0,115 yang artinya kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak sehingga  $H_3$  ditolak. Besarnya kepemilikan modal yang dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi pada perusahaan belum mampu

menekan aktivitas penghindaran pajak maupun memanfaatkan peluang melakukan penghindaran pajak (Purbowati, 2021). Rata-rata kepemilikan manajerial pada perusahaan yang terdaftar di indeks SRI-KEHATI memiliki persentase yang kecil yaitu 0,1% dari jumlah saham beredar. Persentase kepemilikan manajerial yang kecil mengurangi fungsi pengawasan konflik dalam perusahaan karena manajer pada perusahaan yang memiliki peran ganda sebagai pihak *agent* dan *principal* hanya sedikit.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Purbowati (2021) yang menyatakan kepemilikan manajerial tidak memengaruhi penghindaran pajak karena besarnya kepemilikan manajerial belum mampu membuat manajerial memanfaatkan peluang untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang dimiliki oleh manajer dalam perusahaan tersebut, ternyata tidak berpengaruh dalam tax avoidance, hal ini mengonfirmasi teori agensi. Dalam hal ini, si agen (manajemen) dan principal (pemegang saham) adalah orang yang sama, namun tidak memiliki konflik kepentingan. Si Agen tetap menjaga kepentingan perusahaan, di mana agen juga berperan sebagai principal. Hasil dari penelitian ini juga mendukung teori legitimasi, di mana manajemen dapat menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Manajemen dapat bertindak integritas dan objektif, walaupun manajemen juga berperan sebagai pemegang saham.

### **Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance**

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan mendapatkan nilai signifikansi sebesar 0,021 yang artinya *corporate social responsibility* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak namun memiliki arah positif sehingga  $H_4$  ditolak. *Corporate social responsibility* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak artinya semakin banyak pengungkapan *corporate social responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkatkan praktik penghindaran pajak perusahaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang terdaftar di indeks SRI-KEHATI melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaannya. Namun, sangat disayangkan pengungkapan semakin mendukung tindakan penghindaran pajak. Menurut Maulinda & Fidiana (2019) pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* dapat membangun citra atau *image* perusahaan. Perusahaan akan semakin melakukan

tanggung jawab sosial dan lingkungannya supaya dapat meningkatkan citra perusahaannya. Hal ini dapat membantu menutupi kekurangan atau kelemahan perusahaan. Menurut Liu & Lee (2019) *corporate social responsibility* digunakan sebagai alat untuk menutupi kekurangan atau kesalahan perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian, perusahaan yang terdaftar di indeks SRI-KEHATI menggunakan *corporate social responsibility* sebagai alat untuk menutupi kekurangan atau kesalahan perusahaan tak terkecuali terkait pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan pada penelitian Liu & Lee (2019) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Shanghai dan Bursa Efek Shenzhen yang menyatakan adanya pengaruh positif *corporate social responsibility* dengan penghindaran pajak. Dalam Liu & Lee (2019) dikatakan *corporate social responsibility* kemungkinan digunakan sebagai alat dalam menyamarkan kesalahan perusahaan termasuk juga pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang diberikan kepada perusahaan lewat *corporate social responsibility* tidak dijalankan dengan baik. Perusahaan tidak menjalankan legitimasi yang telah diberikan oleh masyarakat. Manajemen sebagai pengelola memiliki kepentingan dalam menjalankan CSR, untuk menyembunyikan pajak perusahaan. Hal ini mengonfirmasi teori agensi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah dilakukan bertujuan untuk menganalisis pengaruh *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* dengan profitabilitas sebagai variabel kontrol pada perusahaan yang terdaftar di indeks SRI-KEHATI pada tahun 2018–2019 yang menghasilkan simpulan sebagai berikut.

1. Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
2. Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
3. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
4. *Corporate social responsibility* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini memberikan implikasi pada pengawas regulator yang berkaitan dengan penghindaran pajak atau Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam meminimalkan penghindaran pajak yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan, yang mana perusahaan dengan tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* tinggi memiliki kecenderungan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Penelitian ini juga memberikan implikasi pada perusahaan yang terdaftar di indeks SRI-KEHATI untuk memastikan risiko dan meminimalkan penghindaran pajak yang merupakan hal penting bagi pemangku kepentingan perusahaan.

### Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya. Berikut adalah keterbatasan dalam penelitian ini.

1. Indeks SRI-KEHATI terdiri dari beberapa perusahaan dengan sektor yang berbeda, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi pada semua sektor perusahaan yang terdapat di Indonesia.
2. Berdasarkan hasil penelitian, model penelitian hanya mampu menjelaskan variasi dalam variabel dependen sebesar 22,7%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam penelitian ini cukup terbatas dalam menjelaskan variabel dependen.

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, maka saran-saran dari peneliti untuk pihak-pihak yang membutuhkan serta penelitian lanjutan adalah sebagai berikut.

1. Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dikemukakan, pada penelitian selanjutnya dapat memperbanyak sampel dengan cara memperpanjang periode pengamatan dan mempertimbangkan periode pengamatan yang akan digunakan.
2. Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dikemukakan, pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan objek penelitian indeks saham atau sektor seperti indeks IHSG, indeks LQ45, sektor pertambangan, sektor perbankan, dan lain-lain.

3. Berdasarkan hasil penelitian, pada penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel independen seperti kualitas audit, kepemilikan institusional, leverage, dan lain-lain untuk mengetahui lebih banyak faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak.

## DAFTAR RUJUKAN

- Alvenina, F. Q. Y. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2014–2019. *Media Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 2(2), 87–106.
- Citradi, T. (2019, Desember 6). *Skandal Harley Garuda Rugikan Negara Rp1,5 M, Ini Hitungannya*. CNBC Indonesia. Retrieved Februari 13, 2023, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191206131032-4-120945/skandal-harley-garuda-rugikan-negara-rp15-m-ini-hitungannya>.
- Doho, S. Z. & Santoso, E. B. (2020). Pengaruh Karakteristik CEO, Komisaris Independen, dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak. *Media Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 1(2), 70–82.
- Fauzan, F., Arsanti, P. M. D., & Fatchan, I. N. (2021). The Effect of Financial Distress, Good Corporate Governance, and Institutional Ownership on Tax Avoidance. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 6(2), 154–165.
- Hartono, J. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman* (6th ed.). Yogyakarta: Badan penerbit fakultas ekonomi UGM.
- Indeks Sri-kehati – KEHATI. (n.d.). KEHATI. Retrieved February 13, 2023, from <https://kehati.or.id/indeks-sri-kehati/>.
- Liu, H. & Lee, H.-A. (2019). The Effect of Corporate Social Responsibility on Earnings Management and Tax Avoidance in Chinese Listed Companies. *International Journal of Accounting & Information Management*, 27(4), 632–652.
- Maulana, A., Yuliandari, W. S., & Kurnia, K. (2019). Pengaruh Corporate Governance, Corporate Social Responsibility dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak (studi Kasus pada Perusahaan Indeks Sri-kehati di Bursa Efek Indonesia Periode 2014–2016). *e-Proceedings of Management*, 6(2), 3083–3089.

- Maulinda, I. P. & Fidiana, F. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Profitabilitas dan Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(4).
- Panjaitan, A., Maksum, A., & Abubakar, E. (2021). The Influence of Corporate Social Responsibility, Corporate Characteristic, Family Ownership, Profitabilitas and Corporate Governance on Tax Avoidance. *Jurnal Mantik*, 4(4), 2331–2335.
- Permatasari, F. & Widianingsih, L. P. (2020). Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi. *Media Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 1(2), 87–114.
- Purbowati, R. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara*, 4(1), 61–76.
- Ratu, B. & Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(9).
- Setianti, P. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Umur Perusahaan, Intensitas Modal dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak. *Doctoral Dissertation, STIE Perbanas Surabaya*.
- Stella, S., Kharismar, E., & Putri, D. I. (2020). Corporate Social Responsibility Disclosure Pada Perusahaan Terdaftar di Indeks SRI-KEHATI. *Media Bisnis*, 12(2), 107–118.
- Januari, D. M. D. & Suardikha, I. M. S. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Sales Growth, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. *E-jurnal Akuntansi*, 27(3), 1653–1677.
- Jensen, M. C. & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Bisnis* (2nd Ed.). Bandung: Alfabeta.
- Tiala, F., Ratnawati, R., & Rokhman, M. T. N. (2019). Pengaruh Komite Audit, Return on Assets (ROA), dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis Terapan*, 3(1), 9–20.

- Wati, R. A. & Utomo R. B. (2020). Pengaruh Thin Capitalization dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Aneka Industri yang Terdaftar di BEI Tahun 2016–2018). *Naskah Publikasi Program Studi Akuntansi*.
- Widyanza, P. (2020). Corporate Social Responsibility Disclosure and Good Corporate Governance on Tax Avoidance. *International Journal of Scientific and Research Publications* (IJSRP), 10(8), 622–632.